



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SRAGEN**

Jln. Mayor Suharto No.6 Sragen 57221

Telp. (0271) 895779 Fax. (0271) 893580

Website : <https://www.pertanian.sragenkab.go.id>

E-mail : pertanian@sragenkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen beserta indikatornya, program, kegiatan dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan. Renja Perubahan ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

Dengan disusunnya Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik, dalam ikut serta mewujudkan tercapainya Bumi Sukowati yang sejahtera dan bermartabat.

Demikian Renja Perubahan ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sragen, 24 Juli 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Sragen



Ir. EKA RINI MUMPUNI TITI LESTARI



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul	1
Kata pengantar	2
Daftar isi	3
Daftar tabel	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s.d Triwulan I dan Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025	12
Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026	82
Tabel 3.2.4 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis 2025 – 2029	84
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen	87



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 sebagai sebuah Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta berpedoman pada RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Penyusunan Rencana kerja Perubahan Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Sragen sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sragen periode 2021 – 2026.

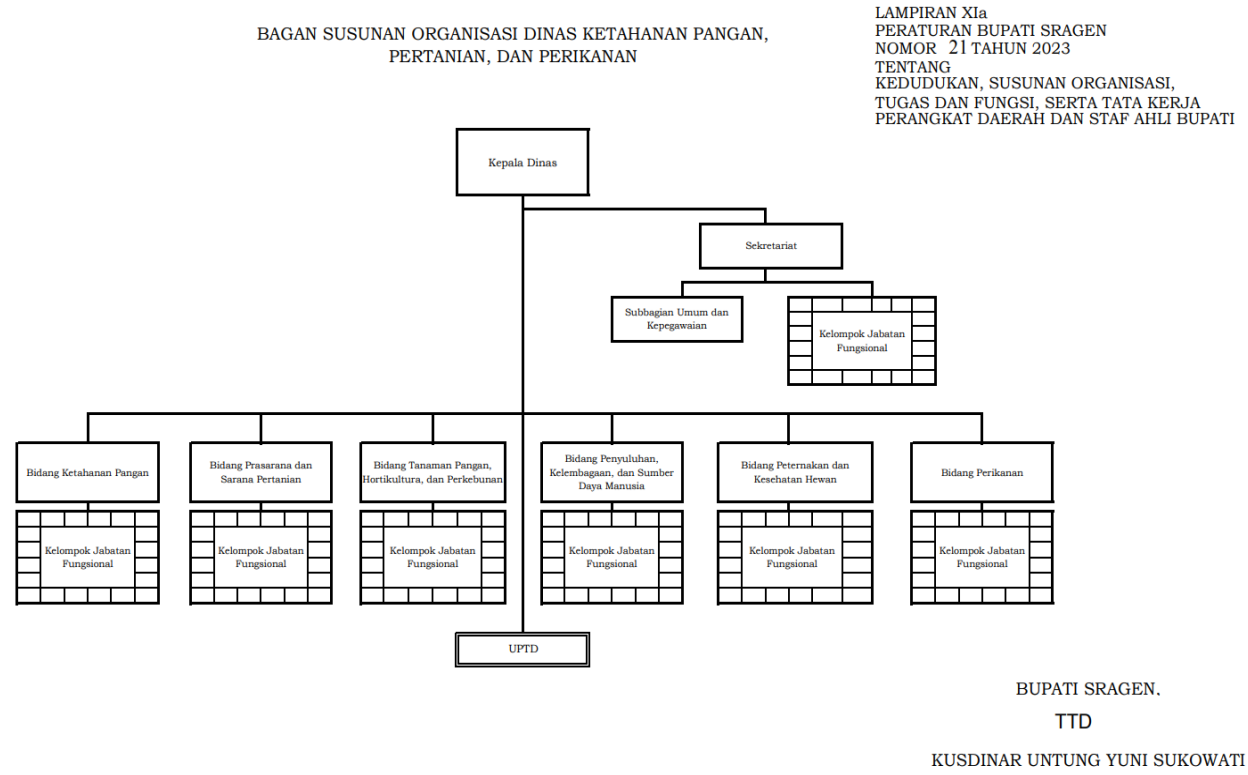
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343, bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Penyusunan Rencana kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan Pangan,, pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan di Kabupaten Sragen sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum



dalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen periode 2021 – 2026.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut:



Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun melalui proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2025, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025, serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen sesuai Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan.

Untuk mendukung keberhasilan program pembangunan daerah disektor Pangan, pertanian, peternakan dan perikanan perlu memperhatikan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan disektor Pangan,, pertanian, peternakan dan perikanan untuk mencapai ketahanan Pangan, wilayah, peningkatan produksi pertanian, produksi peternakan, produksi perikanan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagai tolok ukur arah pelaksanaan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pembentukan rencana kerja perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 09 Seri E Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 05 Seri E Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);

17. Peraturan Bupati Sragen Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

18. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Bupati Sragen yang memuat arah kebijakan teknis dan kegiatan pembangunan sektor Pangan,, pertanian, peternakan dan perikanan di Kabupaten Sragen;
2. Menyediakan dokumen rencana kerja perubahan tahun 2025 di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen pada Tahun 2025;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Renstra Dinas dengan Renja Tahun 2025, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sementara tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025 meliputi rencana sasaran, target capaian kinerja, pagu indikatif serta sumber dananya.
2. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan antar bidang teknis dan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen.

3. Mewujudkan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen yang akuntabel dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan tahunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Perubahan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SRAGEN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SRAGEN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SRAGEN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Triwulan I Tahun 2025

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang.

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen tahun 2025 telah melewati Triwulan I. Sebagian program kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi.

Pada tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen memperoleh anggaran sebesar Rp 43.905.455.195,- sampai dengan Triwulan I sudah terserap Rp. 6.681.971.807,- (15,22%). Berbagai faktor pendorong keberhasilan kinerja diantaranya adanya bantuan pengembangan perikanan tangkap, Adanya kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Adanya kegiatan bantuan sapi dan kambing, Ketersediaan hijauan pakan ternak, Adanya program bantuan padi dan jagung,

Penggunaan bibit bawang merah varietas unggul (Bima Brebes), ketersediaan air untuk tanaman tersedia dengan baik, adanya bantuan pupuk dapat menunjang pertumbuhan tanaman, Prasarana irigasi dalam keadaan baik dan berfungsi untuk mengairi lahan pertanian, Peran PPL dalam mendampingi petani secara intensif dalam hal budidaya pertanian dan Ketersediaan Pangan, utama yang surplus.

Sedangkan beberapa faktor penghambat keberhasilan kinerja diantaranya Refocusing anggaran, Kesesuaian spesifikasi dan calon lokasi pembangunan jalan usaha tani, Keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik, Keterlambatan penyediaan dana untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik, Penyesuaian anggaran kegiatan yang bersumber dari dana DBHCHT, Serangan OPT (tikus, WBC, Thrips) pada komoditas pertanian, dan penyakit LSD dan Anthraks pada hewan.

Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan keberhasilan kinerja diantaranya Percepatan pelaksanaan kegiatan, Pemakaian benih komoditas pertanian varietas unggul yang tahan OPT, Gerakan pengendalian (Gerdal) OPT serentak, Menanam komoditas pertanian off season, Pemberian vaksin pada hewan yang terserang penyakit menular.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel T-C.29

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Sragen

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Faktor	Tindak Lanjut
1	Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian	Persen	1,73	0		
2	Rata rata peningkatan produksi tanaman Pangan,	Persen	0,93	0		
3	Rata rata peningkatan produksi tanaman hortikultura	Persen	2,24	0		
4	Rata rata peningkatan produksi tanaman perkebunan	Persen	2,03	0		
5	Skor Pola Pangan, Harapan (PPH)	Skor	96	0		
6	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Angka	60,7	0		
7	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Angka	2108	0		
8	Persentase peningkatan nilai sektor perikanan dan peternakan	Persen	36,02	0		
9	Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	5,39	0		
10	Persentase peningkatan produksi daging	Persen	66,65	0		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)						83,07	17,00				
Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)						50,00					
Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)						20,83					
Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan											



2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			26.65 3.511. 428		5.433.546.402		20,39		
2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN,			26.65 3.511. 428		5.433.546.402		20,39		
2.09.0 1	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]	100,00	26.34 1.431. 428	25,00	5.433.546.402	25,00	20,63	[TW1 - Penghambat] Capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota realisasinya masih rendah karena kegiatan administrasi keuangan capainnya juga masih rendah	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran disesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan



2.09.0 1.2,02	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan [%]	100,00	24.18 3.509. 403	0,00	5.210.832.872	0,00	21,55	[TW1 - Penghambat] Capaian kegiatan administrasi keuangan realisasinya masih rendah karena sub kegiatan penyediaan gaji capaiannya juga masih rendah	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
2.09.0 1.2,02. 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bula n]	205,00	24.18 3.509. 403	204,00	5.210.832.872	99,51	21,55	[TW1 - Penghambat] Realisasi keuangan penyediaan gaji dan tunjangan masih rendah, karena anggaran gaji dan tunjangan bersifat tidak tetap/mudah bergeser dan berubah tergantung keadaan pegawai	[TW2] Menyesuain kebijakan anggaran gaji



2.09.0 1.2,06	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian ketersediaan (CK) administrasi umum perangkat daerah [%]	100,00	433.2 42.50 0	25,00	33.291.500	25,00	7,68	[TW1 - Penghambat] Capaian kegiatan administrasi umum realisasinya masih rendah karena sub kegiatan pendukungnya capaiannya juga masih rendah. Selain itu adanya efisiensi anggaran	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
2.09.0 1.2,06. 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	12,00	14.45 4.000	3,00	3.351.000	25,00	23,18	[TW1 - Pendorong] Capaian kinerja dan realisasi anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan



2.09.0 1.2.06. 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	12,00	127.408.500	3,00	5.471.000	25,00	4,29	[TW1 - Penghambat] Capaian sub kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor masih sangat rendah karena realisasi keuangannya masih rendah dan adanya efisiensi anggaran	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi capaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
2.09.0 1.2.06. 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	12,00	51.980.000	3,00	0	25,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian sub kegiatan Penyediaan Logistik Kantor masih sangat rendah karena realisasi keuangannya masih rendah (proses SPJ) dan adanya efisiensi anggaran	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran diharapkan sesuai dengan target rencana aksi dan anggaran yang telah ditetapkan



2.09.0 1.2,06. 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	12,00	59.40 0.000	3,00	0	25,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan masih sangat rendah karena realisasi keuangannya masih rendah (proses SPJ) dan adanya efisiensi anggaran	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
2.09.0 1.2,06. 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	12,00	180.0 00.00 0	3,00	24.469.500	25,00	13,59	[TW1 - Penghambat] Capaian sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD masih sangat rendah karena realisasi keuangannya masih rendah dan adanya efisiensi anggaran	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan



2.09.0 1.2,08	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang (CPJP) Pemerintahan Daerah [%]	100,00	1.114.040.025	0,00	132.904.492	0,00	11,93	[TW1 - Penghambat] Capaian kegiatan penyediaan jasa penunjang realisasinya masih rendah karena sub kegiatan pendukungnya capaiannya juga masih rendah. Selain itu adanya efisiensi anggaran	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
2.09.0 1.2,08. 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	12,00	345.756.875	3,00	35.127.492	25,00	10,16	[TW1 - Penghambat] Capaian sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik masih sangat rendah karena realisasi keuangannya masih rendah	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan



2.09.0 1.2,08. 0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	39.319.000	3,00	0	25,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor masih sangat rendah karena realisasi keuangannya masih rendah (proses SPJ) dan adanya efisiensi anggaran	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
2.09.0 1.2,08. 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	728.964.150	3,00	97.777.000	25,00	13,41	[TW1 - Penghambat] Capaian sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor masih sangat rendah karena realisasi keuangannya masih rendah dan adanya efisiensi anggaran	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan



2.09.0 1.2,09	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaa n barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintah n daerah [%]	100,00	610.6 39.50 0	0,00	56.517.538	0,00	9,26	[TW1 - Penghambat] Capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah realisasinya masih rendah karena sub kegiatan pendukungnya capaiannya juga masih rendah. Selain itu adanya efisiensi anggaran	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
------------------	---	---	--	--------	---------------------	------	------------	------	------	---	---



2.09.0 1.2,09. 0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LaPangan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau LaPangan, yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	30,00	529.7 92.00 0	30,00	43.129.538	100,00	8,14	[TW1 - Penghambat] Capaian sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LaPangan, masih sangat rendah karena realisasi keuangannya masih rendah dan adanya efisiensi anggaran	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	--	--	-------	---------------------	-------	------------	--------	------	--	---



2.09.0 1.2,09. 0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi [Unit]	1,00	80.84 7.500	0,00	13.388.000	0,00	16,56	[TW1 - Penghambat] Capaian sub kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya masih rendah karena realisasi keuangannya masih rendah dan adanya efisiensi anggaran	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja (%)							100,00	20,63	25,00	20,63	
Predikat kinerja							ST	SR	SR	SR	

2.09.03	Tercapainya peningkatan diversifikasi dan ketahanan Pangan, masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN, MASYARAKAT	Penguatan Cadangan Pangan, masyarakat [ton]	6,20	109.250.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, Masyarakat masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
---------	--	--	---	------	-------------	------	---	------	------	---	--



2.09.0 3.2,01	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan, Pokok atau Pangan, Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan,	Penyediaan dan Penyaluran Pangan, Pokok atau Pangan, Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan,	Jumlah ketersediaan Pangan, utama [ton]	524.508,00	61.75 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan, Pokok atau Pangan, Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
------------------	---	---	---	------------	----------------	------	---	------	------	---	--



2.09.0 3.2.01. 0006		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan, Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan, Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan [Unit]	1,00	32.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan, Masyarakat dan Toko Tani Indonesia masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	---	---	------	----------------	------	---	------	------	---	---

2.09.0 3.2,01. 0010		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan, Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaa n Distribusi Pangan, [Unit]	1,00	8.500. 000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan, Kabupaten/kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	--	---	------	---------------	------	---	------	------	---	---



2.09.0 3.2,01. 0014		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan, Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok Pangan,, pasokan Pangan, dan harga Pangan, Pokok Strategis [Laporan]	4,00	8.500.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan, Pokok Strategis masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	--	---	------	-----------	------	---	------	------	--	---



2.09.0 3.2,01. 0016		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) [Dokumen]	1,00	12.75 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
2.09.0 3.2,02	Terlaksananya pengelolaan dan keseimbangan cadangan Pangan, kabupaten/ kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan, Kabupaten/Kota	Jumlah pengisian stok Pangan, yang ada dilumbung [ton]	13,00	10.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan, Kabupaten/Kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan



2.09.0 3.2,02. 0002		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan, Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan, Lokal [Dokumen]	1,00	10.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan, Lokal masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	---	---	------	----------------	------	---	------	------	--	---



2.09.0 3.2,04	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan, Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan, Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Kenaikan Angka Kecukupan Protein [%]	0,88	37.50 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan, Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
------------------	---	---	---	------	----------------	------	---	------	------	---	--



2.09.0 3.2,04. 0001		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan, Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan, Per Kapita Per Tahun [Dokumen]	1,00	8.500. 000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan, Per Kapita Per Tahun masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	---	---	------	---------------	------	---	------	------	--	---



2.09.0 3.2,04. 0002		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Berbasis Sumber Daya Lokal [Laporan]	1,00	29.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Berbasis Sumber Daya Lokal masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	0,00	0,00	0,00		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		

2.09.04	Tercapainya Penanganan Kerawanan Pangan,	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN,	Persentase penurunan desa/kel rawan Pangan, [%]	0,96	159.750.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Program Penanganan Kerawanan Pangan, masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
2.09.04.2.01	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan, Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan, Kecamatan	Jumlah desa yang akan dianalisis kerentanan dan ketahanan Pangan,nya [Desa]	208,00	12.750.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan, Kecamatan masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan



2.09.0 4.2,01. 0001		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang Dimutakhirkan [Dokumen]	3,00	12.75 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
2.09.0 4.2,02	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan, Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan, Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penurunan desa/kerawanan Pangan, [%]	0,96	147.0 00.00 0	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Penanganan Kerawanan Pangan, Kewenangan Kabupaten/Kota	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan



2.09.0 4.2.02. 0002		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan, pada Kerawanan Pangan, yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan, pada Kerawanan Pangan, yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota [Dokumen]	1,00	80.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan, pada Kerawanan Pangan, yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	---	--	------	----------------	------	---	------	------	---	--



2.09.0 4.2.02. 0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan, dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan Pangan, dan gizi kabupaten/k ota [Laporan]	4,00	67.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan, dan Gizi Kabupaten/Kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	0,00	0,00	0,00		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		

2.09.05	Tercapainya Pengawasan Keamanan Pangan,	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN,	Tingkat keamanan Pangan, segar asal tumbuhan [%]	13,30	43.080.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Program Pengawasan Keamanan Pangan, masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
2.09.05.2,01	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan, Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan, Segar Daerah Kabupaten/Kota	Presentase produsen yang bersertifikat PSAT dan sertifikat prima 3 [%]	5,00	43.080.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan, Segar Daerah Kabupaten/Kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan



2.09.0 5.2,01. 0007		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu Pangan, segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu Pangan, segar asal tumbuhan daerah kabupaten/k ota [Dokumen]	1,00	24.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu Pangan, segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	---	---	------	----------------	------	---	------	------	---	--

2.09.0 5.2.01. 0008		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu Pangan, segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu Pangan, segar asal tumbuhan [Laporan]	1,00	12.70 5.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu Pangan, segar asal tumbuhan masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	---	---	------	----------------	------	---	------	------	---	--



2.09.0 5.2,01. 0009		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu Pangan, segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu Pangan, segar asal tumbuhan [Dokumen]	1,00	6.375. 000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu Pangan, segar asal tumbuhan masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	0,00	0,00	0,00		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			6.224. 545.1 82		40.320.000		0,65		
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			280.1 13.00 0		6.000.000		2,14		

3.25.03	Tercapainya Pengelolaan Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap [%]	1,75	20.000.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
3.25.03.2,02	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya [Orang]	30,00	20.000.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan



3.25.0 3.2,02. 0001		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya [Orang]	30,00	20.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	0,00	0,00	0,00		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		



3.25.04	Tercapainya Pengelolaan Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya [%]	1,10	239.13.000	0,00	6.000.000	0,00	2,51	[TW1 - Penghambat] Capaian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
3.25.04.2.02	Terberdayanya Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapatkan pelatihan dan stimulan [Kelompok]	2,00	50.000.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan



3.25.0 4.2.02. 0002		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan [Kelompok]	5,00	50.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	--	--	------	----------------	------	---	------	------	--	--



3.25.0 4.2,04	Terkelolanya pembudidayaan ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah lokasi BBI (Balai Benih Ikan) yang dikelola [Lokasi]	3,00	189.1 13.00 0	0,00	6.000.000	0,00	3,17	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
3.25.0 4.2,04. 0004		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan [Dokumen]	4,00	189.1 13.00 0	0,00	6.000.000	0,00	3,17	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan



Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	2,51	0,00	2,51		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		
3.25.06	Tercapainya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan [%]	1,25	21.000.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan

3.25.0 6.2,03	Tersedia dan Tersalurnya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran penerima bantuan sarpras usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan [Kelompok]	4,00	21.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
------------------	--	---	---	------	----------------	------	---	------	------	---	---



3.25.0 6.2.03. 0002		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi [Pelaku Usaha]	30,00	21.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	0,00	0,00	0,00		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			5.944. 432.1 82		34.320.000		0,58		
3.27.0 2	Tercapainya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi [Ton] Produksi Jagung [Ton]	660.865,00 133.500,00	5.050. 883.0 00	252.348,00 61.178,00	24.630.000	38,18 45,83	0,49	[TW1 - Penghambat] Capaian Program Penyediaan dan	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi



			Produksi Kedelai [Ton]	705,00		0,00		0,00		Pengembangan Sarana Pertanian masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
			Produksi Bawang merah [Ton]	1.722,00		773,00		44,89			
			Produksi Cabai [Ton]	3.040,00		1.002,00		32,96			
			Produksi Tebu [Ton]	26.848,00		0,00		0,00			
			Persentase peningkatan daging sapi [%]	0,48		0,00		0,00			
			Persentase peningkatan daging kambing/domba [%]	3,40		0,00		0,00			
			Persentase peningkatan daging unggas [%]	4,26		0,00		0,00			



3.27.0 2.2,01	Tercapainya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah alat dan mesin pertanian dalam kondisi baik [Unit]	84.859,00	25.00 0.000	0,00	2.500.000	0,00	10,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
------------------	--	--	---	-----------	----------------	------	-----------	------	-------	--	--



3.27.0 2.2,01. 0001		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi [Laporan]	1,00	0	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	---	--	------	---	------	---	------	------	---	--



3.27.0 2.2,01. 0002		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendamping an Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian [Laporan]	1,00	25.00 0.000	0,00	2.500.000	0,00	10,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	---	---	------	----------------	------	-----------	------	-------	---	---



3.27.0 2.2,02	Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian [Hektar]	5,00	4.785.000.000	0,00	15.750.000	0,00	0,33	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
------------------	---	--	--	------	---------------	------	------------	------	------	--	--

3.27.0 2.2,02. 0002		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman [Dokumen]	33,00	0	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
3.27.0 2.2,02. 0003		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman [Dokumen]	20,00	4.635.000.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan



3.27.0 2.2,02. 0004		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian [Varietas Unggul Baru (VUB)]	1,00	150.000.000	0,00	15.750.000	0,00	10,50	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	--	--	------	-------------	------	------------	------	-------	--	--



3.27.0 2.2,05	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan ternak sapi, kambing dan domba di UPT AUT [Bulan]	12,00	240.8 83.00 0	0,00	6.380.000	0,00	2,65	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
------------------	--	--	---	-------	---------------------	------	-----------	------	------	--	---



3.27.0 2.2,05. 0009		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia [Laporan]	12,00	240.8 83.00 0	0,00	6.380.000	0,00	2,65	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja (%)						80,96	0,49	17,98	0,49		
Predikat kinerja						T	SR	SR	SR		

3.27.03	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi Baik [%]	53,90	95.99 9.682	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
3.27.03.2,01	Berkembangnya Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah penambahan panjang irigasi tersier per tahun [Meter]	644.609,00	81.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan



3.27.0 3.2.01. 0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya [Laporan]	1,00	81.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
3.27.0 3.2.02	Terbangunnya Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah panjang irigasi tersier dalam kondisi baik (m2) [Meter]	347.416,00	14.99 9.682	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan



3.27.0 3.2.02. 0003		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara [Unit]	2,00	0	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	---	--	------	---	------	---	------	------	---	--



3.27.0 3.2,02. 0008		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara [Unit]	1,00	0	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya anggarannya bersumber dari DAK Fisik, Untuk tahun 2025 Anggaran DAK Fisik bidang pertanian terdampak efisiensi (anggaran nol)	[TW2] -
---------------------------	--	--	--	------	---	------	---	------	------	--	-------------------



3.27.0 3.2.02. 0009		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara [Unit]	1,00	14.99 9.682	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	--	--	------	----------------	------	---	------	------	--	--



3.27.0 3.2.02. 0014		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi [Unit]	2,00	0	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	0,00	0,00	0,00		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		



3.27.04	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis [%]	5,00	89.500.000	0,00	5.940.000	0,00	6,64	[TW1 - Penghambat] Capaian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
---------	--	---	--	------	------------	------	-----------	------	------	--	--



3.27.0 4.2,01	Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktif servis (pengobatan ternak) [Ekor]	3.500,00	43.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
------------------	--	---	--	----------	----------------	------	---	------	------	---	--



3.27.0 4.2,01. 0003		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali [Laporan]	10,00	43.00 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	--	--	-------	----------------	------	---	------	------	---	---



3.27.0 4.2,02	Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan RPH [Bulan]	12,00	37.50 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Dalam daerah Kabupaten/Kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
------------------	--	---	---------------------------------------	-------	----------------	------	---	------	------	---	--



3.27.0 4.2,02. 0007		Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya [Laporan]	12,00	37.50 0.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	---	--	-------	----------------	------	---	------	------	---	---

3.27.0 4.2,04	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah ternak yang dipotong dengan penerapan asas kesejahteraan hewan [Ekor]	250,00	9.000. 000	0,00	5.940.000	0,00	66,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
------------------	--	---	--	--------	---------------	------	-----------	------	-------	--	---



3.27.0 4.2,04. 0002		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan [Laporan]	2,00	9.000.000	0,00	5.940.000	0,00	66,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	6,64	0,00	6,64		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		



3.27.05	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luasan lahan pengendalian OPT [%]	9,00	201.542.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
---------	--	---	--	------	-------------	------	---	------	------	--	--



3.27.0 5.2,01	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luasan lahan yang sudah terkendali OPT [Hektar]	216,00	201.5 42.00 0	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
------------------	--	--	--	--------	---------------------	------	---	------	------	---	---



3.27.0 5.2.01. 0001		Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan [Ha]	306,00	171.8 79.00 0	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,, Hortikultura, dan Perkebunan masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	---	---	--------	---------------------	------	---	------	------	---	---

3.27.0 5.2,01. 0006		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan,, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulan gan pasca bencana alam bidang tanaman Pangan,, hortikultura dan perkebunan [Laporan]	1,00	29.66 3.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan,, Hortikultura dan Perkebunan masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuaikan dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	0,00	0,00	0,00		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		

3.27.07	Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas kelompok tani tahun berkenaan [%]	20,00	506.507.500	0,00	3.750.000	0,00	0,74	[TW1 - Penghambat] Capaian Program Penyuluhan Pertanian masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
3.27.07.2,01	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan pertanian yang dilakukan pendampingan [%]	20,49	506.507.500	0,00	3.750.000	0,00	0,74	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan



3.27.0 7.2,01. 0001		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya [Unit]	20,00	369.682.000	0,00	0	0,00	0,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	--	---	-------	-------------	------	---	------	------	--	--

3.27.0 7.2,01. 0002		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya [Unit]	20,00	126.8 25.50 0	0,00	1.250.000	0,00	0,99	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan
---------------------------	--	---	---	-------	---------------------	------	-----------	------	------	---	--

3.27.0 7.2,01. 0003		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian [Unit]	1,00	10.00 0.000	0,00	2.500.000	0,00	25,00	[TW1 - Penghambat] Capaian Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian masih rendah karena kegiatan belum terlaksana dan belum ada realisasi keuangan (adanya proses efisiensi anggaran)	[TW2] Pelaksanaa n kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana aksi dan ketersediaa n anggaran yang telah ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	0,00				
Predikat kinerja						SR	SR				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SRAGEN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan draft Renstra Kementerian Pertanian tahun 2025 – 2029 dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah mengawal RPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat perencanaan makro untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan daerah melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Pada pembahasan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan disajikan tujuan sasaran dinas periode Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dan tujuan sasaran dinas yang merujuk pada transisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- a. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen memiliki 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) indikator tujuan dengan merujuk pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Tujuan dimaksud diturunkan menjadi 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator sasaran. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen pada Renja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.2.1
 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Mendorong kemandirian dan diversifikasi pangan untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan
		Meningkatnya kemandirian dan diversifikasi pangan untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat	1. Angka Kecukupan Protein (AKP) gram/kap/hari 2. Angka Kecukupan Energi (AKE) kkal/kap/hari
2	Meningkatkan produktivitas pertanian		Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian
		Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan (%) 2. Rata-rata peningkatan produksi tanaman hortikultura (%) 3. Rata-rata peningkatan produksi tanaman perkebunan (%)
3	Meningkatkan Produksi Perikanan dan Peternakan		Persentase peningkatan nilai sektor perikanan dan peternakan
		Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan
		Meningkatnya produksi daging	Persentase peningkatan produksi daging

Tabel 3.2.2
Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2025	Target Akhir Renstra
Mendorong kemandirian dan diversifikasi pangan untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	96	96,2
	Meningkatnya kemandirian dan diversifikasi pangan untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat	1. Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram/kap/hari	60,7	60,7
		2. Angka Kecukupan Energi (AKE)	kkal/kap/hari	2108	2108
Meningkatkan produktivitas pertanian		Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian	%	2,93	2,94
	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan	%	1,08	1,09
		2. Rata-rata peningkatan produksi tanaman hortikultura	%	3,7	3,8
		3. Rata-rata peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	4,12	4,13
Meningkatkan Produksi Perikanan dan Peternakan		Persentase peningkatan nilai sektor perikanan dan peternakan	%	36,02	36,03
	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	5,39	5,40
	Meningkatnya produksi daging	Persentase peningkatan produksi daging	%	66,65	66,66

- b. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen memiliki 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) indikator tujuan dengan merujuk pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Tujuan dimaksud diturunkan menjadi 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator sasaran. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen pada Renja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.2.3
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis 2025 - 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya konsumsi pangan serta produksi pertanian, perikanan dan peternakan secara berkelanjutan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
		Meningkatnya Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
		Meningkatnya Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1. Produksi Pertanian 2. Produksi Perikanan 3. Produksi Peternakan
		Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Tabel 3.2.4
Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2025	Target Akhir Renstra
Meningkatnya konsumsi pangan serta produksi pertanian, perikanan dan peternakan secara berkelanjutan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	89,57	91,87
	Meningkatnya Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	96,2	96,9
	Meningkatnya Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1. Produksi Pertanian 2. Produksi Perikanan 3. Produksi Peternakan	Ton Ton Ton	931.487 18.602,22 630.000	936.154 19,480,41 756.000
	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Nilai Nilai	BB (76,75) 87,05	BB (77,00) 87,30

3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 serta Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan (seperti APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, DAK, DBHCHT dan lain-lain) yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Perumusan perubahan rencana kerja program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025 tersebut telah mempertimbangkan beberapa faktor, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran daerah, dan sasaran perangkat daerah, visi dan misi Kabupaten Sragen tahun 2021-2026.

Pada tahun 2025 jumlah anggaran dana/pagu indikatif pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang bersumber dari DAU Kabupaten Sragen setelah mengalami pergeseran APBD dan Refocussing Anggaran di BPKPD adalah sebesar Rp 40.780.988.007,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar 40.930.988.007,-. Adapun rincian perubahan rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2025

Tabel T-C.33

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Penetapan APBD dan Setelah Refocusing di BPKPD Tahun 2025		Rencana Perubahan APBD Tahun 2025		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Keterangan Alasan Perubahan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			26.993.823.013		25.358.795.528	-1.635.027.485	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN,			26.993.823.013		25.358.795.528	-1.635.027.485	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]	100	26.581.743.013	100	24.994.488.728	-1.587.254.285	
2.09.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan [%]	100	24.423.820.988	211	23.158.943.341	-1.264.877.647	
2.09.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN [Orang/bulan]	205	24.423.820.988	205	23.158.943.341	-1.264.877.647	
2.09.01.2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian ketersediaan (CK) administrasi umum perangkat daerah [%]	100	433.242.500	100	333.237.500	-100.005.000	

2.09.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan [Paket]	12	14.454.000	12	10.795.000	-3.659.000	
2.09.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [Paket]	12	127.408.500	12	95.475.000	-31.933.500	
2.09.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan [Paket]	12	51.980.000	12	49.437.500	-2.542.500	
2.09.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan [Paket]	12	59.400.000	12	41.580.000	-17.820.000	
2.09.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD [Laporan]	12	. 180.000.000	12	135.950.000	-44.050.000	
2.09.01.2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang (CPJP) Pemerintahan Daerah [%]	100	1.114.040.025	100	883.932.765	-230.107.260	
2.09.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan [Laporan]	12	. 345.756.875	12	. 323.756.875	-22.000.000	
2.09.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [Laporan]	12	39.319.000	12	27.526.000	-11.793.000	

2.09.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan [Laporan]	12	728.964.150	12	532.649.890	-196.314.260	
2.09.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah [%]	100	610.639.500	100	618.375.122	7.735.622	
2.09.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LaPangan,	Jumlah kendaraan dinas operasional atau laPangan, yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya [Unit]	30	529.792.000	30	337.297.622	-192.494.378	
2.09.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi [Unit]	3	80.847.500	3	281.077.500	200.230.000	Rehab BPP Sukodono, Kanopi Kantor dan Wallpaper ruangan kepala dinas
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN, MASYARAKAT	Penguatan Cadangan Pangan, masyarakat [ton]	6,2	209.250.000	6,2	183.750.450	-25.499.550	
2.09.03.2,01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan, Pokok atau Pangan, Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan,	Jumlah ketersediaan Pangan, utama (ton)	524.508	61.750.000	524.508	47.011.500	-14.738.500	

2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan, Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan, Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan [Unit]	1	32.000.000	1	30.024.000	-1.976.000	
2.09.03.2.01.010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan, Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan,	1	8.500.000	1	4.455.500	-4.044.500	
2.09.03.2.01.014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan, Pokok Strategis	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan,	3	8.500.000	3	5.673.500	-2.826.500	
2.09.03.2.01.016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Harga Pangan, dan Neraca Bahan Makanan	5	12.750.000	5	6.858.500	-5.891.500	
2.09.03.2.02.006	Pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Kab/Kota	Jumlah pengisian stok Pangan, yang ada dilambung	13	10.000.000	13	6.567.500	-3.432.500	
2.09.03.2.02.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan, Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan, Lokal	1	10.000.000	13	6.567.500	-3.432.500	
2.09.03.2,04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan, Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Prsentase Kenaikan Angka Kecukupan Protein (%)	0,88	137.500.000	0.88	130.171.450	-7.328.550	
2.09.03.2,04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan, Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan, Per Kapita Per Tahun [Dokumen]	1	8.500.000	1	4.913.250	-3.586.750	

2.09.03.2,04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Berbasis Sumber Daya Lokal [Laporan]	1	129.000.000	1	125.258.200	-3.741.800	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN,	Persentase penurunan desa/kel rawan Pangan, [%]	0.96	159.750.000	0.96	148.314.250	-11.435.750	
2.09.04.2,01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan, Kecamatan	Jumlah desa yang akan dianalisis kerentanan dan ketahanan Pangan,nya [Desa]	208	12.750.000	208	7.536.000	-5.214.000	
2.09.04.2,01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang Dimutakhirkan [Dokumen]	3	12.750.000	3	7.536.000	-5.214.000	
2.09.04.2,02	Penanganan Kerawanan Pangan, Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan Pangan, yang ditangani [Desa]	2	147.000.000	2	140.778.250	-6.221.750	
2.09.04.2,02.01	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	80.000.000	1	78.623.000	-1.377.000	

2.09.04.2,02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan, Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan, Kabupaten/Kota [Laporan]	1	67.000.000	1	62.155.250	-4.844.750	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN,	Tingkat keamanan Pangan, segar asal tumbuhan [%]	13.3	43.080.000	13.3	32.242.100	-10.837.900	
2.09.05.2,01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan, Segar Daerah Kabupaten/Kota	Presentase produsen yang bersertifikat PSAT dan sertifikat prima 3 [%]	5	43.080.000	5	32.242.100	-10.837.900	
2.09.05.2,01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota [Dokumen]	1	24.000.000	1	21.549.000	-2.451.000	
2.09.05.2,01.08	Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan mutu Pangan, segar asal tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	12.705.000	1	6.850.600	-5.854.400	
2.09.05.2,01.09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu Pangan, segar asal tumbuhan	Kelembagaan Keamanan Pangan, Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1	6.375.000	1	3.842.500	-2.532.500	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			16.911.632.182		14.844.599.459	-2.067.032.723	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			430.113.000		405.385.600	-24.727.400	

3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap [Persen]	1,75%	20.000.000	1,75%	9.975.000	-10.025.000	
3.25.03.2,02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya [Orang]	30	20.000.000	30	9.975.000	-10.025.000	
3.25.03.2,02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya [Orang]	30	20.000.000	30	9.975.000	-10.025.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya [Persen]	1,1	389.113.000	1,1	383.813.600	-5.299.400	
3.25.04.2,02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang Mendapatkan Pelatihan dan Stimulan [Kelompok]	2	200.000.000	2	196.850.000	-3.150.000	
3.25.04.2,02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan [Kelompok]	5	200.000.000	5	196.850.000	-3.150.000	
3.25.04.2,04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Lokasi BBI (Balai Benih Ikan) yang Dikelola [Lokasi]	3	189.113.000	3	186.963.600	-2.149.400	

3.25.04.2,04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan [Dokumen]	12	189.113.000	12	186.963.600	-2.149.400	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan [Persen]	1,25	21.000.000	1,25	11.597.000	-9.403.000	
3.25.06.2,03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Penerima Bantuan Sarpras Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan [Kelompok]	4	21.000.000	4	11.597.000	-9.403.000	
3.25.06.2,03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi [Pelaku Usaha]	30	21.000.000	30	11.597.000	-9.403.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			16.481.519.182		14.439.213.859	-2.042.305.323	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			9.725.757.000		8.512.903.877	-1.212.853.123	
		Produksi Bawang merah [Ton]	1722		1722			
		Produksi Cabe Besar [Ton]	3040		3040			
		Produksi Jagung [Ton]	133500		133500			
		Produksi Kedelai [Ton]	705		705			
		Produksi Padi [Ton]	660865		660865			
		Produksi Tebu [Ton]	26848		26848			

3.27.02.2,01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah alat dan mesin pertanian dalam kondisi baik [Unit]	84.859	2.859.874.000	84.859	1.415.336.877	-1.444.537.123	
3.27.02.2,01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi [Laporan]	1	2.834.874.000	1	1.394.397.377	-1.440.476.623	
3.27.02.2,01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian [Laporan]	1	25.000.000	1	20.939.500	-4.060.500	
3.27.02.2,02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah luasan lahan pengelolaan tanaman Pangan,, hortikultura dan perkebunan [Hektar]	5	6.625.000.000	5	6.818.524.000	193.524.000	
3.27.02.2,02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman [Dokumen]	33	1.685.000.000	33	1.777.895.000	92.895.000	
3.27.02.2,02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman [Dokumen]	20	4.790.000.000	20	4.890.629.000	100.629.000	
3.27.02.2,02.04	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 VUB	150.000.000	1 VUB	150.000.000	0	

3.27.02.2,05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pemeliharaan Ternak Sapi, Kambing dan Domba di UPT AUT [Bulan]	12	240.883.000	12	279.043.000	38.160.000	
3.27.02.2,05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia [Ton]	12	240.883.000	12	279.043.000	38.160.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi Baik [%]	53.9	1.879.049.682	53.9	603.129.182	-1.275.920.500	
3.27.03.2,01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah penambahan panjang irigasi tersier per tahun [Meter]	644.609 meter	191.750.000	644.609 meter	179.329.500	-12.420.500	
3.27.03.2,01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya [Laporan]	1 laporan	191.750.000	1 laporan	179.329.500	-12.420.500	
3.27.03.2,02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah panjang irigasi tersier dalam kondisi baik	347.416 m2	1.687.299.682	347.416 m2	423.799.682	-1.263.500.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	4 unit	20.000.000	4 unit	20.000.000	0	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya			283.500.000		0	-283.500.000	

3.27.03.2,02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara [Unit]	1 unit	14.999.682	1 unit	14.999.682	0	
3.27.03.2,02.14	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi [Unit]	2 unit	1.368.800.000	2 unit	388.800.000	-980.000.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (%) [Persen]	5	89.500.000	5	87.783.800	-1.716.200	
3.27.04.2,01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aktif Servis (Pengobatan Ternak) [Ekor]	3.500 ekor	43.000.000	3.500 ekor	42.854.800	-145.200	
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	10 Laporan	43.000.000	10 Laporan	42.854.800	-145.200	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan RPH [Bulan]	12 Bulan	37.500.000	12 Bulan	37.500.000	0	
3.27.04.2.02.07	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	12 laporan	37.500.000	12 laporan	37.500.000	0	

3.27.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah ternak yang dipotong dengan penerapan asas kesejahteraan hewan [Ekor]	250 ekor	9.000.000	250 ekor	7.429.000	-1.571.000	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 laporan	9.000.000	2 laporan	7.429.000	-1.571.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Luasan lahan pengendalian OPT [%]	9	201.542.000	9	190.132.500	-11.409.500	
3.27.05.2,01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luasan lahan yang sudah terkendali OPT [Hektar]	216 Ha	201.542.000	216 Ha	190.132.500	-11.409.500	
3.27.05.2,01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan [Ha]	306 Ha	171.879.000	306 Ha	164.055.500	-7.823.500	
3.27.05.2,01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan,, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan,, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan [Laporan]	1 laporan	29.663.000	1 laporan	26.077.000	-3.586.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas kelompok tani tahun berkenaan [%]	20%	4.585.670.500	20%	5.045.264.500	459.594.000	
3.27.07.2,01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Prosentase Kelembagaan pertanian yang dilakukan pendampingan [%]	20,49%	4.585.670.500	20,49%	5.045.264.500	459.594.000	

3.27.07.2,01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya [Unit]	20 unit	4.448.845.000	20 unit	4.448.845.000	0	
3.27.07.2,01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya [Unit]	208 unit	126.825.500	208 unit	92.379.500	-34.446.000	
3.27.07.2,01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian [Unit]	1 unit	10.000.000	1 unit	7.000.000	-3.000.000	
3.27.07.2,01.06	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian	20 unit	-	20 unit	497.040.000	497.040.000	
	Jumlah			43.905.455.195		40.203.394.987	-3.702.060.208	

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan Sragen Tahun 2025 disusun mengacu kepada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Perikanan Sragen Tahun 2025, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025, dan memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Sragen dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Sragen telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

4.2 LANGKAH PERBAIKAN DAN SARAN

A. Langkah Perbaikan

Berdasarkan capaian realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa langkah perbaikan dan saran untuk memperbaiki atau meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya yaitu:



1. Mereviu dan menyusun skala prioritas kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dinas dengan mempertimbangkan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya.
2. Untuk urusan pangan dalam rangka mencapai target kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperlukan langkah konkrit dengan berkoordinasi dengan BULOG untuk menjamin ketersediaan pangan, penyaluran pangan dan stabilitas harga pangan, pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) agar tercipta diversifikasi dan keberagaman pangan.
3. Untuk urusan pertanian dalam rangka mencapai target kinerja persentase peningkatan produksi tanaman pertanian diperlukan konsistensi pengembangan komoditas pertanian khususnya untuk tanaman kedelai dan cabai besar, mengingat banyak petani yang sudah beralih komoditas ke tanaman yang lebih strategis.
4. Untuk urusan perikanan dalam rangka mencapai target kinerja persentase peningkatan produksi perikanan diperlukan langkah dengan mengaktifkan POKMASWAS dengan memulai restocking mandiri dan meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) di masyarakat.
5. Untuk urusan peternakan dalam rangka mencapai target kinerja persentase peningkatan produksi perikanan diperlukan langkah dengan pengadaan obat-obatan dan vaksinasi hewan ternak secara rutin untuk menekan penyakit hewan yang dapat menular dari hewan ke hewan (zoonosis), atau dari hewan ke manusia (zoonosis) seperti Penyakit Kuku dan Mulut (PMK), LSD dan Anthraks.

B. Saran/Rekomendasi

- a. Meningkatkan koordinasi internal bagian dan bidang-bidang Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dalam penentuan skala prioritas penyusunan program, kegiatan, rencana aksi dan anggaran yang mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dinas;
- b. Meningkatkan ketertiban pelaporan monitoring dan evaluasi kegiatan internal bagian dan bidang-bidang Dinas Ketahanan

Pangan Pertanian dan Perikanan untuk menghasilkan perencanaan yang linier, sistematis dan akuntabel;

- c. Internal bagian dan bidang-bidang Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan bertanggungjawab atas pencapaian tujuan dan indikator kinerja sehingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan harus sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan;
- d. Perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala (triwulan) untuk memaksimalkan capaian kinerja oleh pimpinan untuk memantau progres program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target dan waktu yang sudah ditetapkan;
- e. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga pelatihan pengembangan SDM dan organisasi masyarakat dalam upaya pencapaian tujuan strategis dinas.

C. Rencana tindak lanjut

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ditahun berikutnya adalah sebagai berikut :

- **Bagian Sekretariat (Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan):**
 1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dinas dengan mempertimbangkan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
 2. Melaksanakan pemantauan capaian kinerja dinas dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat yang dituangkan pada laporan monitoring dan evaluasi secara triwulan;
 3. Melaksanakan koordinasi dengan internal bidang/bagian dalam mengukur realisasi dan capaian setiap indikator kinerja, mulai dari Indikator Kinerja Utama, Outcome dan Output.



- **Bidang Ketahanan Pangan :**

Dalam rangka mencapai target kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperlukan langkah :

- a. Melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bekerjasama dengan BULOG, Produk dari Kelompok Tani Wanita di tahun 2025 untuk meningkatkan daya beli masyarakat;
- b. Pelatihan dan pemberian bantuan alat pengolahan pangan di Kelompok Tani Wanita (KTW) dari komoditas non beras seperti ubi kayu, ketela pohon, ganyong, garut agar tercipta diversifikasi konsumsi pangan;
- c. Melaksanakan sosialisasi pengenalan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak dini di sekolah - sekolah dasar dengan pemberian susu gratis.
- d. Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan penanganan kerawanan pangan di desa rawan pangan berupa bantuan pangan pokok (beras, gula dan minyak goreng)
- e. Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan penurunan stunting berupa bantuan daging ayam dan telur agar konsumsi kebutuhan protein masyarakat meningkat

- **Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan SDM**

Dalam rangka mencapai target kinerja persentase peningkatan produksi tanaman pertanian diperlukan langkah :

- a. Kegiatan pengembangan komoditas pertanian khususnya kedelai dan cabe besar agar produksi meningkat dengan pemberian bantuan saprodi (benih dan pupuk) jaminan harga jual yang lebih baik agar petani tidak beralih komoditas ke tanaman lain mengingat kedelai dan cabe termasuk dalam komoditas strategis;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kegiatan Ubinan padi, jagung dan kedelai pada setiap subround panen agar diperoleh data produksi yang berkualitas;
- c. Gerakan Pengendalian (GERDAL) Hama Organisme Pengganggu

Tanaman (OPT) oleh Petugas Dinas, PPL, Distanbun Prov Jateng (Lab Pengamatan Hama dan Penyakit), TNI, POLRI dengan Poktan/Gapoktan untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian;

- d. Bekerjasama dengan Perhutani, mengupayakan pemanfaatan lahan dibawah tegakan dan lahan peremajaan untuk ditanami komoditas pertanian/Agroforestry (Sumberlawang, Miri, Jenar dan Tangen) sehingga Luas Tambah Tanah (LTT) komoditas pertanian meningkat;
- e. Pelatihan bagi penyuluhan pertanian lapangan yang adaptif teknologi budidaya pertanian;
- f. Pemerintah melalui Kementan sudah memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan memberikan subsidi pupuk sesuai rekomendasi, baik Urea, NPK, Organik. DKP3 mendampingi petani menghitung kebutuhan pupuk dalam 1 tahun yg diusulkan melalui RDKK, diinput melalui e RDKK. Untuk monitoring penyaluran di kabupaten dibentuk Tim KP3 yg terdiri dari Dinas KP3, Dinas Kumindag, Kepolisian, Kejaksaan, bagian perekonomian Setda dg ketua Tim Sekda Kab. Sragen.

- **Bidang Perikanan**

Dalam rangka mencapai target kinerja persentase peningkatan produksi perikanan diperlukan langkah :

- a. Kontribusi dalam program gerakan Gemar Makan Ikan (GEMARI) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Melaksanakan kegiatan restocking benih ikan secara mandiri
- c. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil berupa paket sarana budidaya ikan (gurami, lele)

- **Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dalam rangka mencapai target kinerja persentase peningkatan produksi daging diperlukan langkah :



- a. Melaksanakan kegiatan pengobatan dan vaksinasi secara gratis dan rutin untuk menekan penyakit hewan (zoonosis);
- b. Melaksanakan pengawasan peredaran lalu lintas hewan yang lebih intensif mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan masuk di pasar hewan;

Demikian Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk dijadikan pedoman Tahun Anggaran 2025 dan diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Sragen



Ir. EKA RINI MUMPUNI TITI LESTARI



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jl. Mayor Suharto No. 6-7 Telp. (0271) 895779 . Facx (0271) 893580 Sragen 57212

Website : pertanian.sragenkab.go.id dan Email: pertanian@sragenkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR : 000.7.2.4/62/010/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi anggaran sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ini.

- KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen;
 - b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen;
 - c. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen;
 - d. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen;
 - e. menyampaikan dokumen rencana kerja perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen tahun 2025 sebagaimana poin e kepada Tim Teknis Verifikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
- KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 25 Juli 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SRAGEN



Ir. EKA RINI MUMPUNI TITI LESTARI

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sragen;
2. Inspektur Inspektorat Kab.Sragen;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Sragen;
5. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 000.7.2.4/62/010/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KETAHANAN
PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. Eka Rini Mumpuni TL	Kepala Dinas	Ketua
2.	Dhian Setyo Handyani, S.STP	Sekretaris	Sekretaris
3.	Ir. Sudadi	Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian	Anggota
4.	Riadi Nugroho, SP, MP	Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
5.	Ir. Suparno, SH, M.Si	Kabid Ketahanan Pangan	Anggota
6.	drh. Suparno	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7.	Herlina Suciwati, S.Pi, M.Si	Kabid Perikanan	Anggota
8.	Supriyanto, S.ST	Kabid Penyuluhan, Kelembagaan, dan Sumber Daya manusia	Anggota
9.	Endri Budi Astuti, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Eko Prabowo, SP, MM	Plt. Kepala UPTD Balai Benih Pertanian	Anggota
11.	Lukman Hakim, SE, M.Si	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
12.	Bethaliana Nurul M, SP	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota
13.	Inung Ardian, SP	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota
14.	Muchtar Arifin, SP	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota
15.	Supriyadi Sri Nugroho, SE	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	Anggota

1	2	3	4
16.	Ir. Natalia Damayanti Endah Palupi	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota
17.	drh. Ana Margaretha	Medik Veteriner Ahli Muda	Anggota
18.	drh. Puri Hidayanti	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Anggota
19.	Umi Wiratri, S.Pt, MM	Medik Veteriner Ahli Muda	Anggota
20.	Nanik Mulyani, SE, MM	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota
21.	Pipin Puja Hernita, SP, MM	Penelaah Kebijakan Teknis	Anggota
22.	Ambita Tito Nugroho, SE	Penelaah Kebijakan Teknis	Anggota

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SRAGEN



Ir. EKA RINI MUMPUNI TITI LESTARI